

DAFTAR REFERENSI

1. Buku

- Bambang, Sunaryo (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Parawisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Hadiyanta, Eka (2017). *Dinamika Pelestarian Cagar Budaya*. Yogyakarta : Ombak
- Lexy, J. Moleong. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Magetsari, N. (2016). *Perspektif Arkeologi Masa Kini*. Jakarta: PT. Kompas Media Jakarta.
- Mulyadi, Y. (2010). *Peran Juru Pelihara Dalam Pelestarian Cagar Budaya*. Pusat Kajian Arkeologi Untuk Masyarakat.
- Narwoko, Dwi.J. Suyanto, Bagong (2011). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Prasetyo, Hari, (2014). *Peran Pemerintah Dalam Upaya Pelestarian dan Perlindungan Kawasan Cagar Budaya*. Yogyakarta : UGM.
- Ranjabar, Jacobus. (2006). *Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar*. Bogor : Ghaliya Indonesia.
- Said, Andi .M (2013). *Refleksi 100 Tahun Lembaga Purbakala Makassar 1913-2013 Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya*. Makassar : Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir.
- Soekanto, Soerjono. (2009). *Peranan Edisi Baru, Rajawali pers*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2018). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press. Hlm 242.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Suhardono, AG, (2013). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta : Pustaka Belajar.
- Suratmi, Nanik. (2016). *Multicultural: Karya Pelestarian Kearifan Lokal 'Kesenian Barongsai Lion'*. Malang : Media Nusa Creative.

2. Jurnal

- Abdillah Junaidi. (2020). Analisis Peran Partisipasi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya Di Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. *Jurnal UM Palembang*, 187–191.
- Afnani, W. N., Wahyuningtyas, N., & Kurniawan, B. (2021). Analisis Pelestarian Situs Cagar Budaya Sekaran (Studi Kasus Situs Sekaran Di Desa Sekarpuro Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(3), 391–406. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.34307>
- Akyuwen, Michael W. Wardana, I. G. A. . (2021). Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Di Kawasan Pariwisata Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. *Universitas Gajah Mada*, 14–15.
- Aridhayandi, M. R. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 48(4), 883–902.
- Arifin, H. P. (2018). Politik Hukum Perlindungan Cagar Budaya Di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 10(1), 65–76. <https://doi.org/10.28932/di.v10i1.1034>
- Eka, Y., & Hasni, M. (2021). Strategi Pelestarian Cagar Budaya : Studi Kasus Daya Tarik Cagar Budaya Gereja Protestan Kota Kupang Kelurahan Lai Lai Besi Koepan. *Jurnal Destinasi Parawisata*, 9(2), 241–250.
- Ekowati, U., Nggonggoek, W., & Utomo, S. S. (2019). Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Peninggalan Situs Cagar Budaya Gua Jepang dan Upaya Pelestariannya. *Jurnal Historia*, 7(1), 131–138.
- Fanani, F., & Kurniati, A. C. (2018). Upaya Pemerintah Dalam Melestarikan Urban Heritage Dalam Mendukung Liveable City Kota Yogyakarta. *Kurvatek*, 3(2), 7–14.

- GINANJAR, D. (2020). Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan Covid-19. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1), 52–68.
- KHALID ROSYADI, MOCHAMAD ROZIKIN, T. (2017). Analisis Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah (Studi pada Pengelolaan dan Pelestarian Situs Majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto) Khalid. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 5, Hal. 830-836, 2(5), 830–836.
- LUKITO, I. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Potensi Indikasi Geografis (Studi Pada Provinsi Kepulauan Riau) (The Roles of Regional Government in Promoting Potential Geographical Indications (Study on the Province of Kepulauan Riau)) Abstrak. *Jikh*, 12(3), 313–330.
- MILADIYANTO, S. D. (2018). Perlindungan Hukum Bangunan Cagar Budaya Di Kota Malang Sebagai Warisan Budaya Bangsa. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 310–338.
- MULYADI, Y. (2010). *Peran Juru Pelihara Dalam Pelestarian Cagar Budaya*. Pusat Kajian Arkeologi Untuk Masyarakat.
- PRAKOSO, F. . (2018). Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Jember. *Digital Repository Universitas Jember*, 1–113.
- QODARIAH, L. S. (2019). Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Melestarikan Situs Cibuaya Sebagai Cagar Budaya Di Kabupaten Karawang. *Chronologia*, 1(1), 22–33.
- ROZA, DARMINI, S.A, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10–21.
- SARI, M. E. P. (2018). Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik. *Trias Politika*, 2(1), 1–12.
- TUPPANG, K. A. . (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Benda-Benda Bersejarah Menurut UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagara Budaya. *Lex Et Societatis*, VII(7), 16–25.
- WIBAWA, I. P. S., & ALI, M. (2020). Efektivitas Hukum Pelestarian Bangunan Dan Lingkungan Cagar Budaya Di Kota Denpasar. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 615–638. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art9>
- YUSLAINI, N., & ADNI, D. F. (2020). Kewenangan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Dalam Perlindungan Cagar Budaya Masjid Jami' Air Tiris. *Jurnal Niara*, 14(1), 142–148. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.5609>

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Surat Keputusan Walikota TanjungPinang Nomor: 485 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 1 Tahun 2019 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 274/MEN/XI/2011 Tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kebudayaan Bidang Cagar Budaya Sub Bidang Perlindungan Cagar Budaya Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

